

PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

TIM KERJA PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK BIRO HUKUM DAN ORGANISASI BPOM Jakarta, 12 Juni 2025

OUTLINE

- 1. Pengantar
- 2. Layanan UPT BPOM
- 3. Standar Pelayanan, FKP dan SKM Pada UPP BPOM
- 4. Penguatan Budaya Inovasi
- 5. Prestasi BPOM dalam Pelayanan Publik



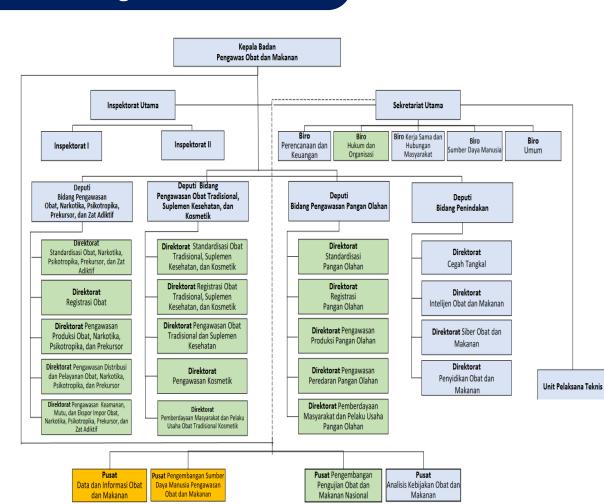


01

PENGANTAR

Sruktur Organisasi BPOM







Total 97 UPP





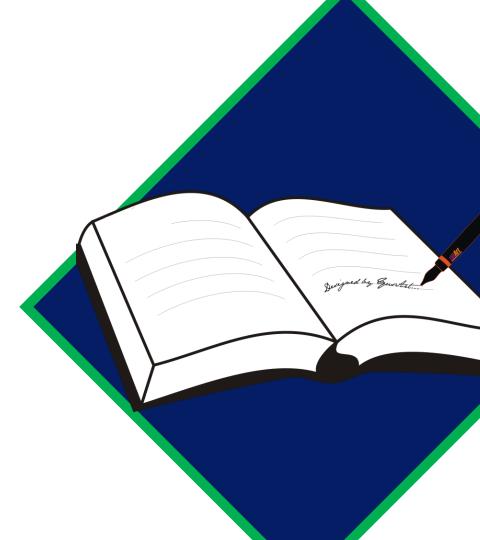
PELAYANAN PUBLIK PADA UPT

Terdapat 9 (sembilan) jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh UPT BPOM sebagai berikut:

- 1. Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan;
- 2. Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan;
- 3. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
- 4. Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB);
- Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB);
- 6. Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik;
- 7. Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- 8. Pengujian Obat dan Makanan; dan
- 9. Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan.



Standar Pelayanan, FKP dan SKM Pada UPP BPOM





Harapan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik





Perlu di Tetapkan Standar Pelayanan Publik



Di Area Mana Saja yang Membutuhkan Standar Pelayanan?

Pasal 21 UU 25/2009

Komponen SP, sekurang-kurangnya meliputi:

- a Dasar hukum
- b. Persyaratan
- c. Sistem, mekanisme, prosedur
- d. Jangka waktu pelayanan
- e. Biaya/tarif
- f. Produk pelayanan
- g. Sarana prasarana dan/atau fasilitas
- h. Kompetensi pelaksana
- Pengawasan internal
- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
- k. Jumlah pelaksana
- Jaminan pelayanan
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan
- n. Evaluasi kinerja pelaksana

Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014

Service Delivery

- 1. Persyaratan
- 2. Prosedur
- 3. Jangka Waktu Penyelesaian
- 4. Biaya/Tarif
- 5. Produk Pelayanan
- 6. Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan

Service Point

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses

penyampaian pelayanan

Manufacturing

- Dasar Hukum
- 2. Sarana dan Prasarana
- 3. Kompetensi Pelaksana
- Pengawasan Internal
- 5. Jumlah Pelaksana
- 6. Jaminan Pelayanan
- 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
- 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Manufacturing

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan **proses pengelolaan** pelayanan di internal organisasi



Siklus Penyusunan Standar Pelayanan





BERKELANJUTA



Pelaksanaan FKP UPP BPOM

Koordinasi pendampingan pelaksanaan dan pelaporan FKP dilakukan **setiap triwulan kepada seluruh UPP** melalui Surat Sekretaris Utama yang memuat sebagai berikut:

1. Himbauan Pelaksanaan FKP

Merupakan Himbauan untuk melaksanakan FKP pada masingmasing UPP dan Penyampaian template laporan FKP serta link pelaporan FKP

2. Reminder Pelaksanaan FKP

Merupakan penyampaian Hasil monitoring pelaksanaan FKP yang telah dilaporkan oleh UPP pada triwulan berjalan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

II. Percetakon Pingaro Ho. 23 Johanta Purot 19360 Indonesia. Telp. (031) 4244691, 4209231, 4263333, 4244735, 4241781, 4244819, Fax: 4345139 Bread: Indoheral@ora.pd id: Vehicles: Investgency pd id.

mor : B-OT.03.04.2.02.25.99 Jakarta, 17 Februari 2025

empiran : 1 (satu) berkas

: Upaya Pengembangan Pelayanan Publik BPOM pada UPP BPOM

Yth. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPON (Daftar Terlampir)

Sehabungan dangan adanya Instindasi Prasidan Nomori 1 Tahun 2025 tentang Edisensi Bidanja datah Paliskanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasarih Tahun Anggaran 2025 yang juga berdampak pada pelaksunaan beberapa tugas fungsi serkal pengawasan Clost dan Makanan, bersama ini disampaikan bersama piri disampaikan bahari alangsia belangan dan dan dan dan pada piri disampaikan bahari alangsia belangan dan pada pelaksunaan pelangan piri disampaikan bahari alangsia belangan pada pelaksunaan pelangan pada piri disampaikan bahari alangsia belangan pelangan pelangan

- Petaksanaan pelayanan publik pada seluruh Unit Penyelenggara Petayanan Publik (UPP) BPOM agar tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada masing-masing UPP.
- 2. Dalam pelakannan Forum Konsultasi Publik (PKP) yang melibatian perwakian 5 (Inra) unun manyankat agar tetap dilakukan secara daring atau Aybrid dengan menyesualkan ketersediaan anggaran pada masing-masing UPP. Format Laporan FKP dan Besta Acura FKP menggunukan format sesual Surat Edaron Menteri PANRII Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelakuan di Lingkup tiantanal Penerapan Standar Pelakuan di Lingkup tiantanal Penerapan standar Pelakus di Lingkup Standar Pelakus P
- 3. Partisipasi manyansiat pada penyasuran kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyasuran kebijaka nampal dengan evakuasi kebijaka sehingga pelaksurasan FKP dapat dilakukan dengan terra lain selain penyasuran standar pelayanan (SP). Dalam hal UPP melaksunakan FKP dengan terra pelayanan publik secara suram (non penyasuran SP) dapat menggunakan format Berba Acara pada Surat Edaran Menteri FANRE Norm 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di Lingkuo Instersi Penyelendah.

Penyampaian pelaksanaan FKP TW I 2025



Template Pelaporan dan Berita Acara FKP

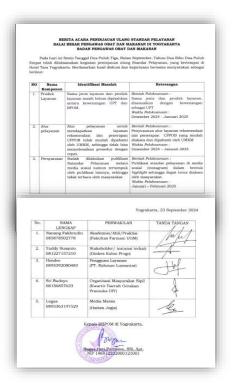


Template Laporan FKP untuk seluruh UPP mengikuti format yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PANRB yang kami sesuaikan dengan format yang dapat langsung disesuaikan oleh UPP di Lingkungan BPOM



Format Berita Acara FKP untuk pelaksanaan FKP terkait Standar Pelayanan mengacu pada SE Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024







Pelaksanaan FKP Terkait SP oleh UPP di Lingkungan BPOM

Pelaksanaan FKP terkait SP telah dilakukan oleh 94 UPP BPOM, 3 Loka POM baru masih dalam proses pendampingan









2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kegiatan diselenggarakan oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

b. Peserta FKP

Peserta yang diundang dalam kegiatan FKP adalah:

- 1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2) Ombudsman Republik Indonesia
- 3) Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 4) Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional BRIN
- 5) Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia)
- 6) Peneliti Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila
- Organisasi Masyarakat Sipil (Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta, Pengurus Pusat Muslimat NU, Pengurus Pusat Salimah)
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
- Media Massa (Kompas.com, Detik.com, Jamu Digital)
- Pengurus asosiasi pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- Pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- 12) Petugas pelayanan publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Beberapa UPP telah melibatkan 6 unsur masyarakat (Hexa Helix) dengan menambah kelompok rentan untuk menerima masukan pelayanan publik ramah bagi kelompok rentan



Kompilasi SP dan Laporan FKP dan TL FKP





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jokarta Pusat 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-OT.03.04.2.22.05.24.406 Jakarta, 27 Mei 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

al : Pelaporan Awal Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

MOS

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Pelayanan Publik

Menindaklanjuti sosialisasi Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah pada 30 April 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa BPOM telah rutin melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait Standar Pelayanan (SP) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) internal setiap tahun.

Pada pendataan awal, sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BPOM yang terdiri dari 18 (delapan belas) UPP Pusat, 21 Balai Besar POM (dua puluh satu), 21 (dua puluh satu) Balai POM, dan 31 (tiga puluh satu) Loka POM telah memiliki Standar Pelayanan dan melaksanakan penetapan/peninjauan standar pelayanan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat meliputi pengguna layanan, lintas sektor terkait, pakar/akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa. Hal ini menunjukkan komitmen BPOM yang tinggi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peninokatan kualitas pelayanan publik BPOM.

LAMPIRAN II Matriks Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya

MATRIKS HASIL TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2023 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN (UPP)	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	REALISASI TINDAK LANJUT
1.	Biro Hukum dan Organisasi https://drive.google.com/file/d/1C 6Ho5Yp48E4FNURhBYH2_QXvx Fm562SZ/view?usp-drive_link	Rencana jangka pendek: 1. Penyusunan modul Qualify Monitoring HALOBPOM 2. Pelatihan Qualify Assurance HALOBPOM 3. Uji coba	BentukTL jangka pendek Telah dilakukan pelatihan QA HALOBPOM serta penyusunan modul Quality Monitoring HALOBPOM
			Waktu Tindak Lanjut Pelatihan telah dilaksanakan pada Agustus 2023 dan telah dilakukan penyusuan modul QA
		Monitoring dan evaluasi modul	Bentuk TL Jangka Panjang 1. Telah dilakukan reviu atas modul Quality Monitoring dan dilakukan penyesuaian atas form parameter penilaiannya.
			Waktu Tindak Lanjut 20 Mei 2024

LAMPIRAN I Matriks Pelaksanaan FKP Tahun Berjalan

MATRIKS PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1. Biro Hukum dan Organisasi

s://drive.google.com/file/d/1P90HAAWG/0LXp/QL6p1VdAoSNJCAWcSI/view?usp=drive_lir

No.	Sumber Input	Bentuk Penyelen ggaraan (Daring/ Luring/ Hybrid)	Tema	Ruang Lingkup FKP	Waktu Pelaksa naan	TIM FKP	Pihak yang Terlibat	Hasil/Kesimpulan/Rekomendasi
1	Hasil Survel Kepuasan Masyarakat Pertemuan Stakeholder Masukan Masyarakat dari Kanal Pengaduan	Luring	Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat dan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	Ruang lingkup keglatan adalah : Mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggara an pelayanan publik yang diterima • Memperoleh masukan dari	17 Oktober 2024	Biro Hukum dan Organisasi	Stakeholder: 1. Kementerian PAN RB Organisael Masyarakat: 1. Poksus Tim Penggerak PKK Provinsi Daerah Khusus Jakarta Pengguna layanan: 1 PT Solitz 1 PT Solitz	Usulan Rekomendasi Pertolikan : 1. Penu dilakukan simpifikasi persyaratan 2. Produk tayanan pada standar pesyaran dayat langsura disebuthan saja barena hanya ada disebuthan saja barena hanya ada standar namahalikan kelengtapan identitas pemboni berupak ontak titik koordinat. 4. Meramahalikan kelengkapan foto produk dan berbagai sep produk dan berbagai sep produk dengan alaeli penandaan yang ya



Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat











Survei dilakukan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik, dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan Organisasi

Survei dilakukan terhadap seluruh jenis layanan yang diberikan Jumlah responden dihitung secara statistik menggunakan formula Krejcie & Morgan, berdasarkan data penerima layanan per jenis layanan di tahun n-1.

*Jumlah responden yang melebihi target tidak dihitung. Survei dilaksanakan secara online dan langsung diolah oleh aplikasi SapaAPIP Masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menindak-lanjuti hasil survei



Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat





Persiapan Survei

Penghitungan Target Responden Survei

Pengaktifan kuesioner:

- 1. Subsite
- 2. SapaAPIP





Pelaksanaa n Survei

± 60 HK





Pengolahan Survei

Paralel bersamaan dengan pelaksanaan survei

Batas waktuCleansing invalid data: (10 HK)





Pelaporan Survei

Pelaporan oleh masing-masing unit selama 15 HK

Penyusunan laporan SKM BPOM **20 HK**



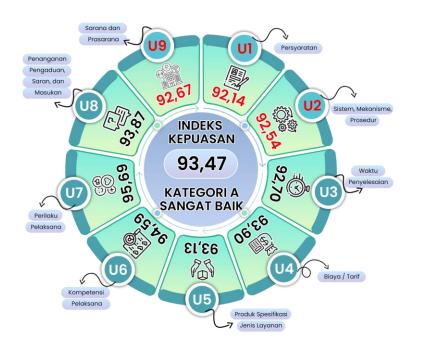


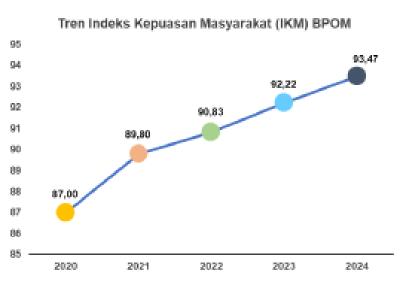
Tindak Lanjut

- Monev TL
 Renaksi SKM
 dilaporkan 2 kali
 dalam setahun
- TL dapat dilaksanakan sepanjang tahun, sesuai timeline rencana aksi



Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BPOM





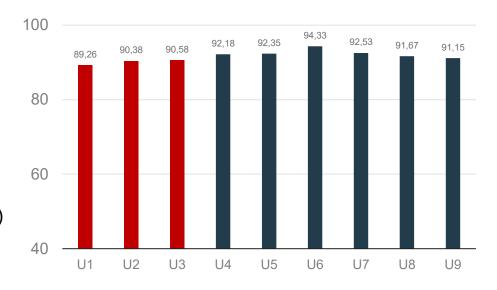


Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Balai POM di Bogor

Target	Capaian	Target	
2024	2024	2025	
89,75	91,60	91,50	

3 Unsur yang paling rendah:

- U1 (Persyaratan Pelayanan)
- o U2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur)
- U3 (Waktu Penyelesaian)



Pemantauan dan **Evaluasi** Penyelenggaraan Pelayanan Publik





Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik

Alur PEKPPP Internal

1. Pembentukan Tim PEKPPP

Tim terdiri dari Unit Kerja Pusat yang memiliki tugas fungsi yang bersinggungan dengan Aspek Penilaian PEKPPP dan tidak menjadi Bagian dari UPP yang dinilai. Tim ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM

3. Penilaian UPP BPOM

Rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1. Entry Meeting
- Pengisian Formulir F01 oleh UPP dan F03 oleh pengguna layanan UPP
- 3. Pengisian F02 oleh Tim Penilai
- 4. Panel Hasil Penilaian
- 5. Exit Meeting
- 6. Penandatangan 🗂 🔃 🤄 ara









2. Persamaan Persepsi

Dilakukan penyamaan persepsi antar tim penilai dan dibuat matriks kesepakatan penilaian yang menjadi acuan bagi seluruh Tim Penilai

5. Penganugerahan

Pemberian piagam penghargaan kepada seluruh UPP BPOM yang memperoleh hasil penilaian dengan kategori minimal P



4. Pelaporan

Penyusunan Laporan disampaikan kepada Kepala BPOM dan Kementerian PANRB

Pendampingan UPP Baru



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakanta Puset 10560 Indonesia Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fox: 4245139 Email : halobpom@pam.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-OT.03.04.22.01.24.53

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Pendampingan Pelaksanaan PEKPPP di Lingkungan BPOM Tahun 2024

Yth. Daftar Undangan Terlamp

Sehubungan dengan akan dilaicanakannya Pemantauan dan Evabasi Kinerja Penyelengasaan Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2024 yang mengkaterakan unti Penyelengapan Apelayanan Publik (PDP) BPOM terlannyi, bersama ini kami sampaikan undangan kegiatan pendalaman Pedonan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisma PEKSPPP beserta data dukung yang dibusuhikan.

Tériat ha fersebut datas, dihangkan agar Bajasi/but dapat menugastan petugas pelayanan puliki atau personol yang kompeten untuk mengluki kegiatan Pendampingan Pelaksanaan PEKPPP BPOM Tahun 2024 yang akan dilalukan secara beriaka sesuaj jadinal kegiatan pendampingan sebagainnan terimpir, dan juga menyangkan narahbung masig-masing untuk pada link beriak tibas. Jiba. Jibasahbung/EKPPBPOM untuk memudahkan koordinasi dan korunikasi kelih korunikasi kelih kangan kelih pendampirangan pelagai pelagai Kelih pendampirangan pelagai kelih pendampirangan pelagai kelih pelagai pelagai kelih pelagai pelagai pelagai Kelih pelagai pelag

> LAMPIRAN Surat Dinas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor : 8-07:00.04.22.01.24.53 Tanggal : 22 Januari 2024

- Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia Pengawasan Obat dan Makar
- Balai Pengujian Produk Biologi
- Balai Pengujian Khusus Obat dan Makana
- Balai Kalibras
- 5. Balai POM di Payakumbi
- 6. Balai POM di Tangerang
- Balai POM di Bogor
 Balai POM di Surakarte
- Dalai PUM di Suraka
- 9. Balai POM di Kediri
- Balai POM di Jember
 Balai POM di Palono
- 12. Loka POM di Kabupaten Aceh Tenga
- 13 1 -t- DOM # K-b----- 4--- 8-t-
- Loka POM di Kabupaten Tol
- 15. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
- 16. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu
- 17. Loka POM di Kabupaten Bungo

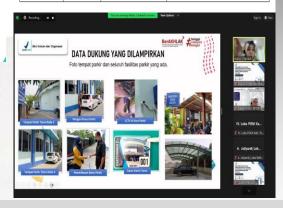
LAMPIRAN

Surat Dinas Kapala Biro Hukum dan Organisasi Nomor : 8-07.02.04.22.01.24.53 Tanggal : 22 Januari 2024

JADWAL KEGIATAN

PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEKPPP BPOM TAHUN 2024

Hari/Tanggal	Waktu	Agenda	Link Zoom Meeting
Selasa / 30 Januari 2024	09.00 WIB s d selesai	Diskusi Awal Pendampingan PEK/PPP	https://mil/beth.zon.us/US-126812897 pad=823910px98/SM-227Th5u7148UU-017098rens=89281106299 Meeting ID: 513 668 1249 Passcode: 1234
Kamis / 01 Februari 2024		Pendampingan PEKPPP:	https://us02web.zoom.us/j/54366812499
	09 00 WB s d selecai	Aspek Kebijakan Pelayanan	pwd-REZWs0pRVrTM3d2TTh5aThVUUUr0T098nmn-83660969751
	00.00 NID 10 30 638	Aspek Profesionalisme SDM	Meeting ID: 543 668 1249
			Passcode: 1234
Selasa / 13 Februari 2024		Pendampingan PEKPPP :	https://us02web.zoom.us/j/5436681249?
	09.00 WIB s.d selesai	Aspek Sarana Prasarana	pard=REZWsOpRVirTM3d2TThSaThVUUUrQT098cmn=86473198173
	08:00 MID 210 SEIESBI	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	Meeting ID: 543 668 1249
			Passcode: 1234
Selasa / 22 Februari 2024		Pendampingan PEKPPP :	https://us02weh.zoom.us/j/54266812499
	09.00 WIB s.d selesai	Aspek Konsultasi dan Pengaduan	psed-REZWs0pRVeTM3d2TTh5aThVULUrQT098cmn=84424140095
		Aspek inovasi	Meeting ID: 543 668 1249
			Passcode: 1234





Pendampingan UPP baru dilakukan pada awal tahun 2024 sebelum pelaksanaan penilaian dilakukan dengan menyampaikan secara detail mekanisme dan instrumen PEKPPP serta kunjungan langsung ke Loka POM yang baru dibentuk untuk pendampingan secara *onsite*.



Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Bogor



Target 2024	Capaian 2024	Target 2025
3,55	3,89 (Baik)	4,20 (sangat baik)



Rekomendasi PEKPPP Balai POM di Bogor

- kentijakan publied ytahaa pelayanan yang mencakup 6 komponen service delivery pada media cetak/non elektronik (brosur, leaflet, majalah, buku saku, atau papan pengumuman) dan media elektronik (TV, layar monitor atau e-Kiosk).
- Melakukan peninjauan ulang standar pelayanan 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan
- Melakukan publikasi maklumat pelayanan pada media cetak/non elektronik dan media Elektronik
- Melakukan publikasi hasil SKM pada media elektronik dan aplikasi yang dapat diunduh melalui PPID BPOM Mobile Melakukan tindak lanjut hasil SKM 100% seluruhnya yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya.
- Agar rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan

- petugas layanan mengacu kertas kerja yang telah disusun dan didokumentasikan dengan baik
- Menerapkan nilai-nilai budaya layanan dalam bentuk slogan, motto, maskot dan Sebagainya

- Publik untuk menyediakan pengelola Mall Pelayanan Publik untuk menyediakan sarana prasarana pelayanan public mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen Penilaian PEKPPP
- Merekomendasikan pihak pengelola Mall Pelayanan Publik untuk menyediakan fasilitas ramah kelompok rentan sesuai Surat Edaran Menpan Nomor 66 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022



Rekomendasi PEKPPP Balai POM di Bogor

- Sistem Informasi Pelayanan Publik Menyediakan Sistem Informasi Pelayanan Publik non elektronik yaitu berupa papan pengumuman atau media cetak dan media elektronik
- Agar pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik di subsite dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap

inovasi pada kompetisi di level apapun

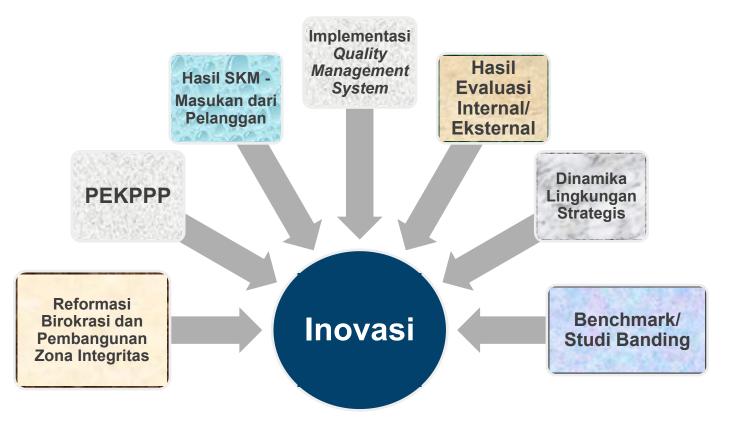
- Konsultasi dan Pengaduan Menyediakan kotak sarah pada loket layanan Balai POM di Bogor di Mall Pelayanan Publik
- Menyusun laporan hasil konsultasi dan pengaduan dan laporan monev tindak lanjut yang memuat rencana, pelaksanaan tindak lanjut, timeline dan status
- Menindaklanjuti seluruh hasil konsultasi dan pengaduan yang masuk di SP4N Lapor! hingga selesai

Penguatan Budaya Inovasi Pelayanan Publik





Penciptaan Inovasi di Lingkup BPOM





Pengelolaan Inovasi di Lingkup BPOM

Belum ada pengelolaan yang terkoordinasi

sebelum nya

2021

Dilaksanakan Kompetisi Inovasi di lingkup internal BPOM □ dikoordinasikan oleh Pusat Pengembangan SDM POM

Pengelolaan inovasi menjadi salah satu tugas Tim Kerja Pengembangan Pelayanan Publik, Biro Hukum dan Organisasi BPOM

2023

2024

Kompetisi Inovasi Internal BPOM

Keikutsertaan pada KIPP melalui penunjukkan oleh Pimpinan Finalis Kompetisi Inovasi internal BPOM didorong untuk ikut berkompetisi pada KIPP.

- Dilakukan pendataan dan "seleksi internal" melalui penilaian terhadap proposal inovasi, sebelum diikutsertakan dalam KIPP.
- Proposal yang masuk menjadi cikal bakal pustaka inovasi pelayanan publik di lingkup BPOM.

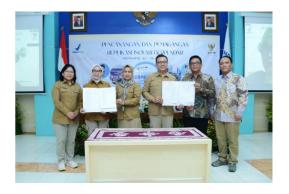
TOP 8 meraih
penghargaan pada rapat
Evaluasi Nasional
Top 24 akan
dipertimbangkan untuk
diikutsertakan pada
KIPP tahun 2025



Replikasi Inovasi BERPENDAR BBPOM di Yogyakarta







- ❖ Kementerian PANRB bersama BPOM melakukan penandatanganan komitmen replikasi inovasi Berpendar (Bersama Pendampingan UMKM untuk Memperoleh Izin Edar) di Yogyakarta. Penandatangan ini dilakukan oleh Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB dan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta.
- ❖ BBPOM di Yogyakarta yang masuk sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 akan direplikasi oleh 20 UPT BPOM.



Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM

Tim Penilai Inovasi Yanblik BPOM Tahun 2024



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG

TIM PELAKSANA KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan secara maksimal, serta meningkatkan persiapan dalam menghadapi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik pada level Kementerian/Lembasa. Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melibatkan seluruh unit pelayanan publik baik di tingkat Pusat dan Unit
- kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
- c. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya serta uhi syarat dan/atau ketentuan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksana Kompetis Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
- dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pertu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tim Pelaksana Kompetisi Pensawas Obat dan Makanan Tahun 2024

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Poraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
- aan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Remublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857); Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembara) Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Pedoman Pembinaan Inovasi yanblik BPOM



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPITTISAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 164 TAHUN 2024 TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN DARMAT TURAN YANG MANA PSA

KEPALA RADAN PENGAWAS ORAT DAN MAKANAN.

- bahwa untuk mengelola inovasi secara sistematis, kolaboratif, dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, perlu disusun Pedoman Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pedoman Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lombaran Nosara Romibble Indonesia Nomor 5038):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Nopara Republik Indonesia Nomor 5357):
 - 3 Porahuran Prociden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Radan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Radan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629):

Juklak Kompetisi Inovasi di Lingkungan BPOM

PETER HIV DELAYSANAAN YOMEPTISI INOMASI DI LINGVINGAN BADAN BOM

PENDAHULUAN

A. Latar Belakane

Pemerintah telah mencanangkan lima prioritas kerja pada tahun 2019-2024 yang mencalnin nembangunan SDM dan infractruktur simplifikasi regulasi penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Salah satu prioritas tersebut adalah penyederhanaan birokrasi pada berbagai sektor pemerintahan untuk mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan serta membuka peluang inovasi sebagai salah satu syarat agar pemerintahan bisa beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawah atas pengawasan obat dan makanan di Indonesia, harus terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada publik. Dalam kerangka reformasi birokrasi berdampak yang terus digaungkan, BPOM memandang penting untuk terus berinovasi dalam menciptakan dan mengembangkan solusi-solusi baru yang dapat meningkatkan kinerja dan memberikan dampak positif basi masyarakat. Kompetisi inovasi merupakan salah satu langkah strategis dalam mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menciptakan dan memastikan keberlanjutan ingyasi di lingkungan RPOM. Untuk itu. BPOM secara rutin akan melaksanakan Kompetisi Inovasi di lingkungan BPOM yang selanjutnya disebut KOIN BPOM

KOIN BPOM merupakan salah satu upaya mengembangkan budaya berinovasi di lingkungan BPOM. Selain itu, KOIN BPOM juga dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dalam persiapan menghadapi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat nasional

R Dacar Huloum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Dokumen ini teleh ditendetengani secare elektronik yang diterbitian oleh Batal Sertifikasi Elektronik (BS/E), BSSI





Proses pembelajaran inovasi dari Kementerian Keuangan sebagai bekal untuk KIPP internal BPOM



Tahapan Pelaksanaan KOIN BPOM 2024







Diberikan oleh Kepala BPOM pada Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2024 dan disaksikan oleh seluruh UPP BPOM



INOVASI PELAYANAN PUBLIK BALAI POM DI BOGOR



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR

Jl. Raya Bogor No. 27 B, Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor 16912

Telp.: 08111188378 Email: bpom_bogor@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR NOMOR HK.02.02.17B.07.24.40 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INOVASI

PENGUJIAN RAPID TES DAN PENYAMPAIAN INFORMASI GRATIS DAN PERIZINAN BARENG PETUGAS BPOM DI BOGOR

> (PUNTEN MANGGA BPOM BOGOR) BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka memakcimalkan pelakcanaan reformati birokrati dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupti (WBK), dan Wilayah Birokrati Bertih dan Melayani (WBBM) serta memberikan Pelayanan Publik yang Prima pada unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perlu adanya inovati yang menunjang pelakcanaan tusap pokok dan fungsi:
 - b. Bahwa pemberian layanan pengujian cepat mobil laboratorium keliling dan informaci terkait Obat dan Makanan serta proses perizinan sangat perlu dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha memahami keamanan Obat dan Makanan dan dapat memprodukci Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing;
 - c. Bahawa untuk meningkatkan pelayanan dalam pemberian pengujian cepat dan informasi Obat dan Makanan seperti yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu adanya penetapan inovasi PengUjiaN rapid TEc daN penyaliphajan INformasi Gratic dan periinan bareng petuGAs BPOM Di Bogor (PUNTEN MANGGA BPOM Bosor);

Ketiga

- : Tim pelaksana Inovasi PengUjiaN rapid TEs daN penyaMpaian iNformasi Gratis dan perizinan bareng petuGAs BPOM Di Bogor (PUNTEN MANGGA BPOM Bogor);
- Fungsi Infokom
- 2 Fungsi Pengujian
- Fungsi Sertifikasi;

Keempat

Seluruh pembiayaan pelaktanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengawat Obat dan Makanan di Bogor;

Kelima

Sarana dan pracarana yang dibutuhkan untuk pelakcanaan kegiatan Inovaci PengUjian rapid TEt dan penyaMpAian iNformaci Gratic dan pericinan bareng petuGAc BPOM Di Bogori (PUNTEN MANGGA BPOM Bogori terdiri dari mobil laboratorium keliling, reagen, peralatan gelac, media informaci (banner, leaflet, gimmick, dill), komputer/laptop, printer, jaringan internet, alat tulic kantor, dan pendukung lainnya;

Calima

: Keputucan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 17 Juli 2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR,

BADAN POM

JEFFETA PRADEKO PUTRA

Penciptaan Inovasi & Pelayanan Publik PUNTEUN MANGGA



Gambar 1. Revitalisasi Mobil Laboratorium Keliling di SDN Kalibaru 5



Gambar 2. Revitalisasi Mobil Laboratorium Keliling di SDN Kalibaru 5

Prestasi BPOM dalam Pelayanan Publik





BPOM sebagai 10 Nominee dalam Anugerah Layanan Investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM



BPOM sebagai Lokus Pelayanan Prima Terbaik Kategori Lembaga yang diwakili oleh BBPOM di Surabaya dari Kementerian PANRB



BPOM sebagai 10 Terbaik Kategori Lembaga untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan yang diwakili oleh BPOM di Bengkulu dari Kementerian PANRB



BPOM meraih Peringkat Terbaik 2 Zona Hijau untuk Penyelenggaraan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI



BPOM meraih Penyelenggara Inovasi Pelayan Publik Terbaik dari Kementerian PANRB



BPOM diwakili Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Balai Besar POM di Yogyakarta, dan Balai Besar POM di Surabaya memperoleh piagam Unit Kerja Berbasis HAM oleh Kementerian HAM pada Evaluasi P2HAM



TERIMA KASIH #SalamPelayananPrima